

**ANALISIS POLITIK HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN
ZAKAT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh :

SUCINADIA KUSUMA

NPM : 1621020014

Jurusan : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2020 M**

**ANALISIS POLITIK HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN
ZAKAT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh :

SUCINADIA KUSUMA

NPM : 1621020014

Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)



Pembimbing I : Prof. Dr. H.Moh. Mukri, M.Ag.

Pembimbing II : Drs. Susiadi AS., M.Sos.I.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2020 M**

ABSTRAK

Zakat artinya suatu kebersihan atau kesucian. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq). Sebagai Negara berpenduduk mayoritas muslim terbesar di dunia, Indonesia tentu mempunyai kesempatan besar dalam hal pengumpulan zakat yang dapat meningkatkan perekonomian umat. Dalam pelaksanaannya zakat mendapat tempat dalam Hukum Tata Negara di Indonesia, dengan demikian Negara turut campur dalam pengelolaan zakat. Hal ini dibuktikan dengan dibuatnya peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, yang merupakan suatu bentuk politik tersendiri dengan tujuan untuk mengakomodasi keinginan kaum muslim di Indonesia, dalam pendahuluan pembayaran zakat.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana peran politik hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 di Indonesia? dan Bagaimana tinjauan politik hukum islam terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengeloan zakat? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana politik hukum Islam dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 di Indonesia dan untuk menganalisis politik hukum islam dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengeloan zakat.

Metode yang digunakan penulis adalah metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang bertujuan mendeskripsikan teknik pengumpulan data dilakukan dengan kajian kepustakaan (*library research*), yaitu mempelajari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya berkaitan dengan judul skripsi.

Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa, Politik hukum Pengelolaan Zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 ayat (1) menyebutkan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengoordinasian dalam pengumpulan dan pendistribuan dan pendayagunaan zakat, Pasal 3 menyebutkan bahwa tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Tinjauan politik hukum islam terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yaitu Masyarakat Indonesia secara politik menerima hukum islam menjadi hukum positif.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Letkol H.Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, 35131

Pernyataan Orisinalitas

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : Sucinadia Kusuma
NPM : 1621020014
JURUSAN : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iiyyah)
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS POLITIK HUKUM ISLAM TERHADAP
PENGELOLAAN ZAKAT DALAM UNDANG-
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan merupakan hasil orisinal penulis, tidak mengandung materi yang telah dipublikasikan oleh orang lain kecuali diakui dengan referensi yang dibuat dalam teks. Jika kemudian hari terbukti bukan hasil karya sendiri maka saya siap ditindak dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 11 Maret 2020

Saya yang menyatakan,

Sucinadia Kusuma

NPM. 1621020014



KEMENTERIAN AGAMA
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG**
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Leikol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, 35131

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi dengan nama:

Nama : Sucinadia Kusuma

Npm : 1621020014

Jurusan : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)

Fakultas : Syari'ah

Judul : ANALISIS POLITIK HUKUM ISLAM TERHADAP
PENGELOLAAN ZAKAT DALAM UNDANG-
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag

Drs. Susiadi AS., M.Sos.I

NIP. 195904161987031002

NIP. 195808171993031002

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Erengki, M.Si

NIP. 198005152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarama, Bandar Lampung, 35131

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “ANALISIS POLITIK HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT” Disusun oleh : Sucinadia Kusuma, NPM : 1621020014, Jurusan : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar’iyyah), Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari’ah Pada hari Kamis, 18 juni 2020.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : H. Rohmat, S.Ag., M.HI.

Sekretaris : Hendriyadi, S.H.I, M.H.I.

Penguji Utama : Dr. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.

Pembimbing I : Prof. Dr. H.Moh. Mukri, M.Ag.

Pembimbing II : Drs. Susiadi AS, M.Sos.I.

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIP. 196210221993031

MOTTO

وَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: “dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang – orang yang ruku”. (QS. Al-baqarah: 43)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada

1. Kepada kedua orang tuaku tercinta untuk ayahku Exsir Firmansyah dan tentunya ibuku Zahrani yang senantiasa mendoakan ku setiap waktu yang telah rela dan sabar membesarkanku, mendidik dan merawatku sejak dalam kandungan sampai aku menginjak dewasa ini. Berkat ketulusan doa keduanya lah aku dapat menyelesaikan kuliah ini. Tidak pernah mengeluh dan selalu memberikan yang terbaik untukku. Semoga gelar yang aku dapatkan akan menjadi kebanggaan bagi kedua orangtuaku.
2. Kepada abang-abangku Hadiantoni Kusuma dan Eza Dwi Kusuma karena merekalah yang selalu memberikan dukungan semangat serta bimbingan kepadaku. Terimakasih abang telah menjadi panutan untukku sehingga aku semangat menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada Pembimbing I Bapak Prof. Dr. H.Moh. Mukri, M.Ag. dan Pembimbing II Bapak Drs. Susiadi AS., M.Sos.I. yang telah sabar membimbing dan memberi pengarahan kepada ku untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada Nurman Satya Marga yang selalu ada di setiap proses menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih selalu berkata “iya” dalam membantuku.

5. Sahabat-sahabat ku terutama yang hari-hari selalu bersama ku, aku sebutkan menurut abjad ya, Bundo Sulistiawati Anggi Mawarni, Dinis Dinda Puja Hasifah, Tiya Fitri Sari, dan Dewi Purnama sari, kemudian tidak lupa juga sahabatku sampai sekarang Rani, dedew, sintia, wiwit, ulan, donna, ria, ninuk, riska, nindy, dharma, pinoy dan tidak bisa kusebutkan satu persatu disini. Terimakasih untuk kalian yang selalu memotivasiku dan membantuku dalam setiap keadaan.
6. Terimakasih kepada sepupu ku kakak zaitun ismi yang selalu memberikan motivasi dan ayunda fadhilah dias putri sejak sd sampai kuliah bersamaku.
7. Teman-temanku satu angkatan 2016 khususnya di Siyasah B dan kepada khususnya Nindy Andriani Rifanda, Tri Oktaviani, Mutia Resta Eliska, yang senantiasa membantuku, terimakasih karena kalianlah masa kuliah ku berwarna.
8. Terimakasih kepada kelompok KKN 223 telah melaksanakan 40hari dengan 14 kepala yang berbeda.
9. Terimakasih kepada kelompok PPS 14 yang mana aku merasakan menjadi hakim.
10. Almamaterku tercinta Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Sucinadia Kusuma, penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 31 juli 1998, penulis merupakan anak bungsu dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Exsir Firmansyah dan Ibu Zahrani.

Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-kanak di TK Aisyiah Bustanul Athfal I Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2004, setelah itu penulis melanjutkan studi di SD Negeri 5 Sukajawa yang diselesaikan pada tahun 2010 kemudian melanjutkan studi di Mts Negeri 1 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2013, dan melanjutkan studi di MAN 2 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2016. Pada 2016 kemudian penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri tepatnya di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung mengambil jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah).

Bandar Lampung, 11 Maret 2020

Sucinadia Kusuma

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Swt, Yang Maha Kuasa yang telah memberikan nikmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini ANALISIS POLITIK HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT sebagai persyaratan guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum dalam Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam skripsi masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, mengingat kemampuan yang terbatas. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini, rasa hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada yth :

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frengki, M.Si Selaku Ketua Jurusan dan Bapak Hervin Yongky Pradikta, M.H.I. Selaku Sekretaris Jurusan Siyasah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag. dan Bapak Drs. Susiadi AS., M.Sos.I. Selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, yang penuh kesabaran memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis

dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Seluruh dosen-dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan pengarahan dan ilmu dibangku kuliah hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Almamater UIN Raden Intan Lampung tercinta.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, mengingat kemampuan yang terbatas. Akhirnya penulis berharap semoga karya tulis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang	3
D. Fokus Penelitian	11
E. Rumusan Masalah	12
F. Tujuan Penelitian.....	12
G. Signifikansi Penelitian.....	12
H. Metode Penelitian.....	13

BAB II POLITIK HUKUM ISLAM DAN ZAKAT

A. Politik Hukum Islam	16
1. Pengertian Politik Hukum Islam	16
2. Sejarah Politik Hukum Islam	18
3. Prinsip dan Teori Politik Hukum Islam	30
B. Zakat.....	38
1. Pengertian Zakat.....	38
2. Dasar Hukum Zakat	39
3. Harta Benda yang Wajib Dikeluarkan	43
4. Hikmah dan Manfaat Zakat.....	46
C. Tinjauan Pustaka	48

BAB III PENGELOLAAN ZAKAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

A. Sejarah Terbentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat	50
B. Kontruksi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat	69
C. Pengaturan Pengelolaan Zakat Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.....	73

BAB IV ANALISIS DATA

A. Politik Hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 di Indonesia	79
B. Analisis Politik Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.....	83

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	88

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memudahkan pemahaman mengenai judul skripsi ini dan supaya tidak menimbulkan kekeliruan atau kesalahpahaman, maka perlu dijelaskan secara singkat tentang istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Skripsi ini berjudul : **“Analisis Politik Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat Dalam Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat”**. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut :

1. Analisis

Analisis dalam kamus besar Bahasa Indonesia berarti : “Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya). Penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan ; penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya ; proses pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.”¹

¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (edisi ke 4), PT Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2011, h. 83

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 merupakan Undang-Undang yang membahas tentang pengelolaan zakat².

3. Politik Hukum Islam

Padmo Wahjono mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk. Di dalam tulisannya yang lain Padmo Wahjono memperjelas definisi tersebut dengan mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan suatu yang di dalamnya mencakup pembentukan, penerapan dan penegakan hukum.³ Sementara Moh. Mahfud MD, seorang ahli tata negara menganggap politik hukum masuk dalam disiplin ilmu hukum. Politik hukum adalah kebijakan yang akan atau telah dilaksanakan pemerintah.⁴

Abdul Wahab Kallaf mengatakan politik hukum Islam adalah suatu tema dan terjemahan dari *Siyasah Syar'iyah* yang secara terminologis diartikan pengurus hal-hal yang bersifat umum untuk Negara Islam dengan cara menjamin perwujudan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan, dengan tidak melampaui batas-batas *Syar'iyah* dan pokok-pokok *Syar'iyah* yang bersifat umum, walaupun tidak

² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

³ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 1

⁴ Moh. Mahfud, *Politik Hukum*, h. 1

ditetapkan dalam nash dan hanya menyandarkan kepada pendapat mujtahid.⁵

B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan yang menjadi motivasi penulis untuk memilih judul ini sebagai bahan untuk penelitian :

1. Secara Objektif :
 - a. Memperdalam pengetahuan penulis tentang politik hukum Islam dalam pembentukan Undang-Undang di Indonesia.
 - b. Memberikan pemahaman dan wawasan kepada masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai syariat agama Islam.
2. Secara Subyektif :
 - a. Data dan literatur yang mendukung pembahasan cukup tersedia untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
 - b. Pokok bahasan judul yang dibahas dalam kajian ini sesuai dengan jurusan yang sedang penulis dalami, yaitu *Siyasah Syar'iyah*.

C. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan bagi umat Muslim. Zakat adalah satu rukun yang bercorak sosial ekonomi dari lima rukun Islam. Dengan zakat, di samping ikrar tauhid (syahadat) dan shalat, seseorang barulah sah masuk kedalam barisan umat Islam dan diakui keIslamannya.⁶

⁵ Pulung, J. Suyuthi. *Fiqh Siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h. 78

⁶ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, terj. Saiman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, cet. Ke-III (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 1993), h.3

Al-Qur'an dan sunnah selalu menggandengkan shalat dengan zakat. Ini menunjukkan betapa eratnya hubungan antara keduanya. KeIslaman seseorang tidak akan sempurna kecuali dengan kedua hal tersebut. Zakat merupakan jembatan menuju Islam, Siapa yang melewatinya akan selamat sampai tujuan dan siapa yang memilih jalan lain akan tersesat. Abdullah bin Mas'ud mengungkapkan, "Anda sekalian diperintahkan menegakkan shalat dan membayarkan zakat. Siapa yang tidak mengeluarkan zakat maka shalatnya tidak akan diterima."⁷ Keduanya (antara zakat dan shalat) mempunyai kedudukan yang sama, hal tersebut bisa dilihat bahwa kata zakat dalam Al-Qur'an sering kali ditemukan dengan kata shalat secara berdampingan. Salah satunya yaitu pada Surat Al-Baqarah ayat 43:



وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: "dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang – orang yang ruku."⁸

Menurut Yusuf al-Qardhawi, zakat adalah ibadah maliyah ijtima'iyah yang memiliki posisi dan peranan yang penting, strategis dan menentukan. Artinya zakat tidak hanya berdimensi maliyah (harta/materi) saja, tetapi juga ijtima'iyah (sosial).

⁷ Yusuf Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995, h.92

⁸ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, (Jakarta, Kencana, 2008), h.17

Sesuai dengan firman Allah Swt. dalam At-Taubah ayat 11 :

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ
الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

Artinya: "Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama, dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui." ⁹

Jika zakat dikelola dengan baik, baik pengambilan maupun pendistribusiannya, pasti akan dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat.¹⁰

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dijelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam.¹¹ Di pelaksanaan ibadah zakat membutuhkan peran negara agar dapat dikelola secara maksimal sehingga dapat mewujudkan tujuan disyariatkannya ibadah zakat yang salah satunya adalah untuk mengentaskan kemiskinan, menurut Yusuf Qaradhawi urusan zakat adalah bukan urusan pribadi, akan tetapi tugas pemerintahan Islam.¹² Perintah zakat yang diturunkan pada periode Makkah baru sebatas anjuran untuk berbuat baik kepada fakir miskin dan

⁹ Fakhrruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), h.27

¹⁰ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, h.140

¹¹ Pasal 1 (ayat 2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

¹² Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat(terjemahan)*, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011), h.742

orang yang membutuhkan bantuan, sedangkan yang diturunkan pada periode Madinah adalah perintah wajib secara mutlak untuk dilakukan.¹³

Zakat diperintahkan oleh Islam, disamping merupakan bentuk ibadah kepada Allah, sesungguhnya zakat itu diperintahkan mengandung maksud atau alasan sebagai berikut :

1. Pengamalan syariat Islam perlu biaya tinggi
2. Islam tidak menghendaki umatnya melarat
3. Manusia mempunyai kecenderungan bersifat serakah
4. Syariat zakat menuntut keseimbangan kemakmuran umat
5. Syariat zakat mengajarkan kedisiplinan umat
6. Syariat zakat mengajarkan keharmonisan umat
7. Syariat zakat menuntut kearifan umat
8. Syariat zakat menghendaki terwujudnya umat yang *baldatun thoyyibatun wa rabbun ghafur*

Zakat merupakan sumber dana yang sangat potensial, namun sumber zakat tidak akan dapat terkumpul apabila pelaksanaan zakat itu diserahkan pada kemauan wajib zakat saja, sebab apabila zakat diserahkan pada kemauan wajib zakat saja akan menimbulkan akibat yang negatif antara lain:

1. Para wajib zakat yang belum mantap kesadaran beragamanya atau mempunyai sikap mental egoistis dan materialistis tidak akan tergugah

¹³ Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 57

hatinya untuk menolong sesama manusia yang memerlukan uluran tangan melalui kewajiban zakat.

2. Fakir miskin dan mustahiq lainnya, merasa lebih terhormat, tidak merasa malu, segan atau tersinggung perasaannya, apabila mereka menerima zakat dari pemerintah dari pada menerima langsung dari wajib zakat.
3. Distribusi tidak merata kepada mustahiq, apalagi sampai kedelapan ashnaf/jalur yang berhak menerimanya, tidak efisien, efektif dan produktif, sehingga tidak tercapai tujuan utama zakat.¹⁴

Pada zaman sekarang ini bentuk penghasilan yang paling mencolok adalah apa yang diperoleh dari pekerjaan dan profesinya. “pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam. Pertama adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung pada orang lain, berkat kecekatan tangan dan otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan professional, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, advokat, seniman, penjahit, tukang kayu dan lain-lainnya. Kedua, adalah pekerjaan yang dikerjakan oleh seseorang buat pihak lain baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah yang diberikan, dengan tangan, otak, ataupun keduanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah ataupun honorium.”¹⁵

Ketika Indonesia merdeka, kesadaran membayar zakat telah dilakukan dengan lebih baik dengan elemen-elemen masyarakat dan

¹⁴ Masyfuk Zuhdi, *Masa 'ihl Fiqhiyah*, (Jakarta: CV Masagung, 1994), hlm 230.

¹⁵ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Lintera Antar Nusa, 1996), h 459

kesadaran itu perlu diiringi dengan tindakan *real* dengan segenap masyarakat untuk saling mengingatkan dan saling menasehati tentang penting arti zakat keselarasan hidup, dukungan real pemerintahan pun perlu sebagai justifikasi.¹⁶

Mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah pemeluk agama Islam. Zakat merupakan hal yang tidak asing pada masyarakat Indonesia khususnya (salah satu bentuk zakat). Penanganan zakat di Indonesia bisa dibilang belum serius untuk kesejahteraan bersama terkadang hanya sebatas berorientasi pada posisi konsumtif. Kemudian di bentuk Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 namun saat ini sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dengan didirikannya lembaga-lembaga pengelolaan zakat baik di tingkat lokal maupun nasional.¹⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, disebutkan bahwa asas-asas Lembaga Pengelolaan Zakat adalah:

1. Syariat Islam. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Lembaga Pengelola Zakat haruslah berpedoman sesuai dengan syariat Islam, mulai dari tata cara perekrutan pegawai hingga tata cara pendistribusian zakat.
2. Amanah. Lembaga Pengelola Zakat haruslah menjadi lembaga yang dapat dipercaya.

¹⁶ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, cet. ke1 (Yogyakarta: Idea Press, 2011), h.15

¹⁷ Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h.112

3. Kemanfaatan. Lembaga Pengelola Zakat harus mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik.
4. Keadilan. Dalam mendistribusikan zakat, Lembaga Pengelola Zakat harus mampu bertindak adil.
5. Kepastian hukum. Muzakki dan mustahik harus memiliki jaminan dan kepastian hukum dalam proses pengelolaan zakat.
6. Terintegrasi. Pengelolaan zakat harus dilakukan secara hierarki sehingga mampu meningkatkan kinerja pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
7. Akuntabilitas. Pengelolaan zakat harus bisa dipertanggung jawabkan kepada masyarakat dan mudah diakses oleh masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan.

Adapun tujuan dari pengelolaan zakat berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah:

1. Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.¹⁸

Politik hukum pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 ayat (1) menyebutkan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengoordinasian dalam pengumpulan dan pendistribuan dan

¹⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

pendayagunaan zakat, Pasal 3 menyebutkan bahwa tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Dalam penjelasan umum dikatakan bahwa penunaian zakat merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat dan penanggulanagan kemiskinan. Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Mengingat kurangnya pemahaman masyarakat tentang pengelolaan zakat sesuai dengan politik hukum Islam dan Undang-Undang. Dalam hal ini diharapkan dengan adanya pengelolaan zakat dapat diwujudkan sebagai lembaga jaminan sosial untuk kesejahteraan umat, dan mengingat pentingnya tentang tata cara pengelolaan zakat sesuai dengan politik hukum Islam dan Undang-undang, penulis tertarik untuk menelitinya masalah pengelolaan zakat sesuai dengan politik hukum Islam dan Undang-Undang.

D. Fokus Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan bagian yang membatasi serta menjelaskan substansi materi kajian penelitian yang akan dilakukan. Ruang lingkup penelitian berguna untuk memberi batasan agar penelitian dapat berfokus kepada fokus penelitian yang dijalankan sehingga peneliti akan lebih mudah dan fokus dengan penelitian yang akan dijalankan yaitu mengenai “Analisis Politik Hukum Islam terhadap Pengelolaan Zakat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat”

Pembatas ruang lingkup penelitian didasarkan pada permasalahan yang dibahas pada latar belakang masalah yang dijelaskan secara rinci dan ringkas ke dalam identifikasi masalah. Jadi, fokus penelitian dalam penelitian ini adalah menjabarkan mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan melihat analisis politik

Pembatas ruang lingkup penelitian didasarkan pada permasalahan yang dibahas pada latar belakang masalah yang dijelaskan secara rinci dan ringkas ke dalam identifikasi masalah. Jadi, fokus penelitian dalam penelitian ini adalah menjabarkan mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan melihat analisis politik hukum Islam terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat secara lebih mendalam lagi.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana politik hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 di Indonesia ?
2. Bagaimana tinjauan politik hukum Islam terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat ?

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana politik hukum Islam dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 di Indonesia.
2. Untuk Menganalisis politik hukum Islam dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

G. Signifikansi Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran dan kontribusi terhadap penelitian selanjutnya, terutama dalam bidang Siyasah Syar'iyah, khususnya kajian mengenai politik hukum Islam terhadap pengelolaan zakat.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memperluas wawasan bagi penulis dan untuk memenuhi syarat akademik yang diperlukan untuk mencapai gelar S1 jurusan Siyasah Syar'iyah pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan, metode penelitian ini seringkali dikacaukan dengan prosedur penelitian, atau teknik penelitian, hal ini disebabkan ketiga hal tersebut saling berhubungan dan sangat sulit untuk dibedakan.¹⁹ Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian library research yaitu penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.

b. Sifat Penelitian

Berdasarkan sifatnya penelitian ini berisi sifat deskriptif analitik yang merupakan suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan diantara unsur yang ada dan fenomena tertentu.²⁰

¹⁹ Susiadi, *Metode penelitian*, (Bandar Lampung : Pusat Penelitian Dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2016), h.21

²⁰ Kaelan, Ms, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Jakarta: Paradigma, 2005), h. 58

2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini dibutuhkan beberapa jenis data sesuai sumbernya masing-masing sebagai berikut :

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh dari perpustakaan dalam hal yang berasal dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Data sekunder yaitu data yang tidak didapatkan secara langsung oleh peneliti, buku-buku yang menulis tentang zakat tetapi diperoleh dari orang atau pihak lain seperti laporan-laporan buku, serta jurnal penelitian.
- c. Data tersier merupakan sumber data yang memberikan penjelasan terhadap jurnal, bahan hukum premier dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.²¹

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka yaitu dengan cara melalui buku-buku umum maupun agama, berbagai peraturan perundang-undangan, Penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi dengan beberapa macam materi yang terdapat diruang perpustakaan.²²

²¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : PT Citra Aditiya Bakti, 2004), h.115

²² Kaelan, Ms, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Jakarta: Paradigma, 2005), h.3

4. Teknik Pengolahan Data

Secara umum teknik pengolahan data setelah data terkumpul dapat dilakukan sebagai berikut :

- a. pemeriksaan data (*Editing*), yaitu mengoreksi data yang terkumpul apakah sudah cukup lengkap dan sudah sesuai dengan masalah yang dikaji oleh penulis. Dalam hal ini penulis mengetik kembali hasil data yang terkumpul melalui study pustaka, dokumen apakah sudah lengkap dan relevan, dan tidak berlebihan dalam kesalahan.
- b. Rekontruksi data (*Reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan logis sehingga mudah dipahami sesuai dengan permasalahan kemudian diambil kesimpulan sebagai tahap akhir dalam proses penelitian.²³

5. Teknik Analisa Data

Untuk melakukan analisis data yang telah terkumpul penulis menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan deduktif. Metode berfikir deduktif yaitu cara berfikir dengan menggunakan analisis yang berpijak dari pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian diteliti dan kemudian hasilnya dapat memecahkan persoalan kasus.²⁴

²³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Cipta Aditya Bakti, 2004), h.126

²⁴ Ibid, h.127

BAB II

POLITIK HUKUM DAN ZAKAT

A. Politik Hukum Islam

1. Pengertian Politik Hukum Islam

Politik berasal dari bahasa Latin *politicus* dan bahasa Yunani *Politicos*, artinya sesuatu yang berhubungan dengan warga negara atau warga kota. Kedua kata itu berasal dari kata polis artinya Kota. Politik juga diartikan sebagai seni memerintah dan mengatur masyarakat. Sedangkan secara terminologi Politik ialah cara dan upaya menangani masalah-masalah rakyat dengan seperangkat undang-undang untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah hal-hal yang merugikan bagi kepentingan manusia.²⁵

Politik dalam bahasa Arab disebut *siyasah* yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu. Fiqh yang membahas masalah itu disebut Fiqh *Siyasah*. Secara terminologis, politik sebagai menjadikan syari'at sebagai pangkal tolak, kembali dan bersandar kepadanya, mengaplikasikannya di muka bumi, menancapkan ajaran dan prinsip-prinsipnya di tengah

²⁵ B.N. Marbun, *Kamus Politik* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), h. 462

manusia, sekaligus sebagai tujuan dan sasarannya, sistem dan jalannya.²⁶

Dalam kajian politik hukum Islam, terdapat tiga istilah penting yang memiliki hubungan makna dengan politik hukum Islam, yaitu (1) *ilmu taqnin al-ahkam*, (2) *ilmu tathbiq al-ahkam*, (3) *ilmu taghyir al-ahkam*. *Taqnin al-ahkam* adalah ilmu yang membahas teori-teori legislasi hukum Islam dan penerimaannya sebagai sumber otoritatif dalam tata hukum suatu negara. *Tathbiq al-ahkam* adalah ilmu yang membahas tata atur penerapan hukum Islam setelah dilegislati, diterima sebagai sumber otoritatif, dan tertuang dalam bentuk qanun. Adapun *taghyir al-ahkam* adalah ilmu yang membahas perubahan (amandemen) atas hukum yang telah dijalankan, tetapi dinilai tidak memenuhi aspek-aspek keadilan dan kemaslahatan (kepentingan) publik.²⁷

Politik Islam juga dapat diartikan sebagai aktivitas politik sebagian umat Islam yang menjadikan Islam sebagai acuan nilai dan basis solidaritas berkelompok. Hal ini karena Islam adalah meliputi akidah dan syariat, *ad Diin wad Daulah*. Hal itu sangat berbeda dengan agama-agama lain, seperti Kristen, Yahudi, Budha, Hindu. Karena agama-agama tersebut hanya memuat tuntunan moral saja, tetapi tidak mengajarkan sistem politik, sistem ekonomi, sistem hukum, sistem pemerintahan dan sistem sosial.

²⁶ *Ibid*, h.35

²⁷ Dr. Ija Suntana, M.Ag, *Politik Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 1

Sehingga wajar jika kemudian pelibatan agama tersebut dalam kehidupan politik dan pemerintahan akan menyebabkan pemerkosaan dan penodaan terhadap agama. Karena pada dasarnya yang membuat aturan tersebut bukanlah Tuhan, tetapi akal dan nafsu manusia. Tetapi sangat berbeda dengan Islam yang bersifat syamil dan kamil, yaitu bersifat menyeluruh, tidak memiliki cacat sedikit pun, mengatur seluruh sisi kehidupan manusia dari kehidupan individu, keluarga, masyarakat, dan negara. Dari urusan yang paling kecil seperti makan, tidur dan lain-lain sampai yang paling besar, seperti politik, hukum, ekonomi.

2. Sejarah Politik Hukum Islam

Politik Islam secara umum terbagi menjadi tiga macam²⁸, yaitu:

A. *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah Dusturiyah merupakan segala bentuk tata ukuran atau teori-teori tentang Politik Tata Negara dalam Islam atau yang membahas masalah Perundang-undangan Negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Artinya, Undang-Undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip Islam dalam hukum-hukum syari'at yang disebutkan di dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain.

²⁸ Esposito, J.L., *Ancaman Islam: Mitos atau Realitas* (Edisi Revisi, Bandung : Mizan, 1996) h.162

Prinsip yang diletakkan dalam perumusan Undang-Undang Dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya Peraturan Perundang-Undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Sebagai suatu petunjuk bagi manusia, al-Qur'an menyediakan suatu dasar yang kukuh dan tidak berubah bagi semua prinsip etik dan moral yang perlu bagi kehidupan ini. Menurut Muhammad Asad, Al-Qur'an memberikan suatu jawaban komprehensif untuk persoalan tingkah laku yang baik bagi manusia sebagai anggota masyarakat dalam rangka menciptakan suatu kehidupan berimbang di dunia ini dengan tujuan terakhir kebahagiaan di akhirat. Ini berarti penerapan nilai universal Al-Qur'an dan hadist adalah faktor penentu keselamatan umat manusia di bumi sampai di akhirat, seperti peraturan yang pernah dipraktikkan Rasulullah SAW dalam negara Islam pertama yang disebut dengan Konstitusi Madinah atau Piagam Madinah.²⁹

²⁹ Mohd. Said Ishak, *Hudud dalam Fiqh Islam* (Johor: Universiti Teknologi Malaysia 2003), h. 15

Setelah Nabi wafat, tidak ada konstitusi tertulis yang mengatur negara Islam, umat Islam dari zaman ke zaman, dalam menjalankan roda pemerintahan berpedoman kepada prinsip Al-Qur'an dan teladan Nabi dalam sunnahnya. Pada masa khalifah empat, teladan Nabi masih dapat diterapkan dalam mengatur masyarakat Islam yang sudah berkembang. Namun pasca khulafaur-Rasyidin tepatnya pada abad ke-19, setelah dunia Islam mengalami penjajahan barat, timbul pemikiran di kalangan ahli tata negara di berbagai dunia Islam untuk mengadakan konstitusi. Pemikiran ini timbul sebagai reaksi atas kemunduran umat Islam dan respon terhadap gagasan politik barat yang masuk di dunia Islam bersamaan dengan kolonialisme terhadap dunia Islam. Sebab salah satu aspek dari isi konstitusi atau Undang-Undang Dasar adalah bidang-bidang kekuasaan Negara. Kekuasaan itu dikenal dengan istilah Majlis Syura atau Ahl Al-halli wa al-Aqdi.

Menurut Abdul Kadir Audah, kekuasaan dalam Negara Islam itu dibagi ke dalam lima bidang, artinya ada lima kekuasaan dalam Negara Islam, yaitu:

1. Sulthah Tanfizhiyyah (kekuasaan penyelenggara Undang-Undang).
2. Sulthah Tashri'iyah (kekuasaan pembuat Undang- Undang).
3. Sulthah Qadhoiyah (kekuasaan kehakiman).
4. Sulthah Maliyah (kekuasaan keuangan).

5. Sulthah Muraqabah wa Taqwim (kekuasaan pengawasan masyarakat).³⁰

B. *Siyasah Dauliyah*

Siyasah Dauliyah merupakan segala bentuk tata ukuran atau teori-teori tentang sistem hukum internasional dan hubungan antar bangsa. Pada awalnya Islam hanya memperkenalkan satu sistem kekuasaan politik negara yaitu kekuasaan di bawah risalah Nabi Muhammad SAW dan berkembang menjadi satu sistem khilafah atau kekhilafaan. Dalam sistem ini dunia internasional, dipisahkan dalam tiga kelompok kenegaraan, yaitu, pertama, Negara Islam atau darussalam, yaitu Negara yang ditegakkan atas dasar berlakunya syariat Islam dalam kehidupan. Kedua, darus-harbi, yaitu negara non Islam yang kehadirannya mengancam kekuasaan Negara-Negara Islam serta menganggap musuh terhadap warga Negeranya yang menganut agama Islam. Ketiga, darus-sulh, yaitu Negara non-Islam yang menjalin persahabatan dengan Negara-Negara Islam, yang eksistensinya melindungi warga Negara yang menganut agama Islam.

Antara darus-salam dengan darus-sulh terdapat persepsi yang sama tentang batas kedualatannya, untuk saling menghormati dan bahkan menjalin kerja sama dengan dunia Internasional. Keduanya saling terikat oleh konvensi untuk tidak saling

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 111

menyerang dan hidup bertetangga secara damai, sementara hubungan antara darus-salam dengan darus-harb selalu diwarnai oleh sejarah hitam. Masing-masing selalu memperhitungkan terjadi konflik, namun demikian Islam telah meletakkan dasar untuk tidak berada dalam posisi pemrakarsa meletusnya perang. Perang dalam hal ini merupakan letak mempertahankan diri atau sebagai tindakan balasan. Perang dalam rangka menghadapi serangan musuh di dalam Islam memperoleh pengakuan yang syah secara hukum, dan termasuk dalam kategori jihad.

Meskipun jihad dalam bentuk perang dibenarkan di dalam Islam, namun pembenaran tersebut sebatas di dalam mempertahankan diri atau tindakan balasan. Juga terbatas di dalam rangka menaklukkan lawan bukan untuk membinasakan dalam arti pembantaian atau pemusnahan. Oleh karena itu, mereka yang menyerah, terampas, para wanita, orang tua dan anak-anak, orang-orang cacat, tempat-tempat ibadah, dan sarana serta prasarana ekonomi rakyat secara umum harus dilindungi.³¹

Kekuasaan politik berikutnya mengalami perubahan tidak hanya mengakui satu sistem khilafah tetapi telah mengakui keragaman tentang khilafah. Selain itu juga memberi pengakuan atas otonomi Negara bagian kerajaan maupun kesultanan di Spanyol hingga Asia Tenggara. Pada konteks sekarang teori politik

³¹ Hendrojono, *Kriminologi, Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum* (Surabaya: PT. Dieta Persada, 2005), h. 173-174

Islam kontemporer hanya memperkenalkan konsepsi hukum internasional dalam dua bagian besar; pertama, al-Ahkam ad-Dauliyah al-Ammah; yaitu suatu hukum internasional yang menangani masalah-masalah makro. Kedua, al-Ahkam ad-Dauliyah al-Khosoh, yaitu suatu hukum internasional yang menangani masalah-masalah mikro.

Menurut Ali Anwar sebagaimana dikutip Hendrojono terdapat delapan prinsip-prinsip politik luar Negeri dalam siyash dauliyah.³²

1. Saling menghormati fakta-fakta dan traktat- traktat (perjanjian), yang dijelaskan dalam Q.S Al-Anfal Ayat : 58

وَمَا تَخَافُ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِبِينَ

Artinya : *Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, Maka kembalilah Perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. (Q.S Al-Anfal Ayat : 58).*³³

³² Ibid, h.175

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan* (Semarang: CV.Toha putra, 1989), h.488

2. Kehormatan dan integrasi Nasional

وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَا
تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ
أُمَّةٍ ۚ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ ۚ وَلِيُبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مَا كُنْتُمْ
فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٩٢﴾

Artinya : Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi cerai berai kembali, kamu menjadikan sumpah (perjanjian) mu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Sesungguhnya Allah hanya menguji kamu dengan hal itu. dan Sesungguhnya di hari kiamat akan dijelaskan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu. (QS.An-Nahl: 92).³⁴

3. Keadilan universal Internasional

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اْعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ
لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Maidah: 8).³⁵

³⁴ Ibid,h.568

³⁵ Ibid,h.325

4. Menjaga perdamaian abadi.
5. Memberikan perlindungan dan dukungan kepada orang-orang Islam yang hidup di Negara lain.

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ
 اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوُوا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَالَّذِينَ
 ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلِيَّتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا
 وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ
 وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٧٢﴾

Artinya : Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itu satu sama lain lindung-melindungi. dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, Maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah. (akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, Maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada Perjanjian antara kamu dengan mereka. dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Anfal: 72).³⁶

³⁶ Ibid, h.492

6. Bersahabat dengan kekuasaan-kekuasaan netral

لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ تُخْرِجُوا مِنْ دَيْرِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾

Artinya : Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan Berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang Berlaku adil. (QS. Al-Mumtahanah: 8).³⁷

7. Kehormatan dalam hubungan internasional

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَنُ ﴿٦٠﴾

Artinya : Tidak ada Balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula). (QS.Ar-Rahman: 60).³⁸

8. Persamaan keadilan untuk para penyerang

وَأِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ۚ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴿١٢٦﴾

Artinya : Dan jika kamu memberikan balasan, Maka balaslah dengan Balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. akan tetapi jika kamu bersabar, Sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar.(QS. An-Nahl: 126).³⁹

³⁷ Ibid, h.789

³⁸ Ibid, h.648

³⁹ Ibid,h.564

C. *Siyasah Maliyah*

Siyasah Maliyah adalah Politik yang mengatur sistem ekonomi dalam Islam. A.Mudhofir menyatakan bahwa politik ekonomi Islam adalah sejumlah hukum (kebijakan) yang ditujukan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan primer setiap individu dan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan pelengkap (kebutuhan sekunder dan tersier) sesuai dengan kadar kemampuannya. Untuk itu, semua kebijakan ekonomi Islam harus diarahkan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan asasi dan (jika memungkinkan) terpenuhinya kebutuhan pelengkap pada setiap orang (perindividu) yang hidup di dalam Negara Islam, sesuai dengan syariah Islam.⁴⁰

Dengan demikian, politik ekonomi Islam didasarkan pada empat pandangan dasar yaitu:

1. Setiap orang adalah individu yang membutuhkan pemenuhan atas kebutuhan-kebutuhannya.
2. Adanya jaminan bagi setiap individu yang hidup di dalam Daulah Islamiyah untuk memenuhi kebutuhan primernya.
3. Islam mendorong setiap orang untuk berusaha dan bekerja mencari rezeki agar mereka bisa mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan hidup, alias bisa memasuki mekanisme pasar.
4. Negara menerapkan syariah Islam untuk mengatur seluruh interaksi di tengah-tengah masyarakat serta menjamin

⁴⁰ Abdullah Mudhofir, *Jihad Tanpa Kekerasan* (Jakarta: Inti Media, 2009) h. 59

terwujudnya nilai-nilai keutamaan dan keluhuran dalam setiap interaksi termasuk interaksi ekonomi.

Atas dasar itu, politik ekonomi Islam tidak sekadar diarahkan untuk meningkatnya pendapat nasional (GNP) atau disandarkan pada pertumbuhan ekonomi nasional, keadilan sosial, dan lain sebagainya.

Politik ekonomi Islam terutama ditujukan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan primer secara menyeluruh bagi setiap orang yang hidup di Negara Islam. Atas dasar itu, persoalan ekonomi bukanlah bagaimana meningkatkan kuantitas produksi barang dan jasa, tetapi sampainya barang dan jasa itu kepada setiap orang (distribusi). Hanya saja, pertumbuhan ekonomi juga menjadi obyek yang diperhatikan dan hendak diselesaikan di dalam sistem ekonomi Islam. Dari sini bisa disimpulkan, bahwa obyek persoalan ekonomi dalam sistem ekonomi Islam ada 2 macam:

1. Politik ekonomi.
2. Pertumbuhan kekayaan.

Menurut an-Nahbani dan al-Maliki, politik ekonomi Islam adalah jaminan atas pemenuhan seluruh kebutuhan pokok (*al-hajat al-asasiyah/basic needs*) bagi setiap individu dan juga pemenuhan berbagai kebutuhan sekunder dan luks (*al-hajat al-kamaliyah*) sesuai kadar kemampuan individu bersangkutan yang hidup dalam masyarakat tertentu dengan kekhasan di dalamnya. Dengan

demikian titik berat sasaran pemecahan permasalahan dalam ekonomi Islam terletak pada permasalahan individu manusia bukan pada tingkat kolektif (negara dan masyarakat)⁴¹.

Menurut al-Maliki, ada empat perkara yang menjadi asas politik ekonomi Islam. Pertama, setiap orang adalah individu yang memerlukan pemenuhan kebutuhan. Kedua, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok dilakukan secara menyeluruh (lengkap). Ketiga, mubah (boleh) hukumnya bagi individu mencari rezki (bekerja) dengan tujuan untuk memperoleh kekayaan dan meningkatkan kemakmuran hidupnya. Keempat, nilai-nilai luhur (syariat Islam) harus mendominasi (menjadi aturan yang diterapkan) seluruh interaksi yang melibatkan individu-individu di dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa politik ekonomi kebijakan fiskal Islam adalah menjamin pemenuhan kebutuhan pokok setiap warga negara (Muslim dan non Muslim/kafir dzimmi) dan mendorong mereka agar dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki.

⁴¹ B.N. Marbun, *Kamus Politik*.....h.53

3. Prinsip dan Teori Politik Hukum Islam

Sebagaimana hukum-hukum yang lain, hukum Islam memiliki prinsip-prinsip dan asas-asas sebagai tiang pokok, kuat atau lemahnya sebuah undang-undang, mudah atau sukarnya, ditolak atau diterimanya oleh masyarakat, tergantung kepada asas dan tiang pokoknya.⁴² Secara etimologi (tata bahasa) prinsip adalah dasar, permulaan, aturan pokok. Adapun secara terminologi Prinsip adalah kebenaran universal yang inheren didalam hukum Islam dan menjadi titik tolak pembinaannya prinsip yang membentuk hukum dan setiap cabang-cabangnya.

Prinsip hukum Islam meliputi prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum ialah prinsip keseluruhan hukum Islam yang bersifat *universal*. Adapun prinsip-prinsip khusus ialah prinsip-prinsip setiap cabang hukum Islam.⁴³

A. Sistem Musyawarah (As - Syura)

Syura adalah sistem Arab original dan merupakan satu tradisi suku-suku Arab tribal yang sudah membumi dan turun-temurun hingga sekarang. Ia muncul dan tumbuh, bukan untuk menguasai kepala atau kepala suku, melainkan lebih merupakan mekanisme penjaringan ide-ide terbaik dan terbagus yang berlangsung di lembaga Majelis Permusyawaratan Suku. Sedangkan kata *syura* dalam bahasa Arab berarti menjaring ide-

⁴² Hasbi Ash-Shiddiqie, *Pengantar Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1958), h. 209

⁴³ Suryadi, *Kamus Baru Bahasa Indonesia* (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), h. 190

ide terbaik dengan mengumpulkan sejumlah orang yang diasumsikan memiliki akal, argumentasi, pengalaman, kecanggihan pendapat, dan prasyarat-prasyarat lain yang menunjang mereka untuk memberikan pendapat yang tepat dan keputusan yang tegas.

Musyawarah dapat juga diartikan sebagai suatu forum tukar menukar pikiran, gagasan, ataupun ide, termasuk saran-saran yang diajukan dalam memecahkan suatu masalah sebelum tiba pada suatu pengambilan keputusan. Dilihat dari sudut kenegaraan, maka musyawarah adalah suatu prinsip konstitusional, dalam politik Islam yang wajib dilaksanakan dalam suatu pemerintahan dengan tujuan untuk mencegah lahirnya keputusan yang merugikan kepentingan umum atau rakyat. Sebagai suatu prinsip konstitusional, maka dalam politik Islam musyawarah berfungsi sebagai rem atau pencegah kekuasaan absolut dari seorang penguasa atau kepala Negara.⁴⁴

Meskipun demikian, musyawarah berbeda dengan demokrasi liberal yang berpegang pada rumus $\frac{1}{2}$ setengah plus satu atau suara mayoritas yang lebih dari separo berakhir dengan kekalahan suara bagi suatu pihak dan kemenangan bagi pihak yang lain. Dalam musyawarah yang dipentingkan adalah jiwa

⁴⁴Amirsyah, *Meluruskan Salah Paham Terhadap Deradikalisasi Pemikiran, Konsep dan Strategi Pelaksanaan* (Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2012).h.112

persaudaraan yang dilandasi keimanan kepada Allah, sehingga yang menjadi tujuan musyawarah bukan mencapai kemenangan untuk pihak atau golongan tertentu, tetapi untuk kepentingan atau kemaslahatan umum dan rakyat. Karena itu, yang perlu diperhatikan dalam musyawarah bukan soal siapa yang menang dan siapa yang kalah, tetapi sejauh mana keputusan yang akan diambil itu dapat memenuhi kepentingan atau kemaslahatan umum dan rakyat. Inilah yang dijadikan suatu kriterium dalam pengambilan keputusan melalui musyawarah menurut politik Islam. Selain itu, dalam setiap musyawarah yang perlu diperhatikan adalah bukan siapa yang berbicara. Jadi dalam musyawarah buah pikiran seseorang adalah lebih penting dari orangnya sendiri. Mungkin saja buah pikiran itu lahir dari seorang yang bukan hartawan atau bangsawan, namun gagasannya itu sangat berguna bagi kepentingan umum ketimbang misalnya, buah pikiran dari seorang yang memiliki kedudukan lebih tinggi dalam masyarakat, namun tidak berguna bagi kepentingan umum, maka buah pikiran yang pertama itulah yang patut diperhatikan dalam musyawarah.

Lebih lanjut prinsip musyawarah bertujuan melibatkan atau mengajak semua pihak untuk berperan serta dalam kehidupan bernegara. Pada masa Rasulullah Saw sebagai kepala negara, beliau selalu mengumpulkan para sahabat di Masjid Madinah

untuk bermusyawarah setiap kali beliau menghadapi masalah kenegaraan. Tradisi ini dilanjutkan oleh keempat khalifah yang menggantikan Rasulullah Saw, yaitu Abu Bakar, Umar, Usman, dan Ali bin Abi Thalib.⁴⁵

B. *Al-Adl* (Keadilan).

Prinsip keadilan merupakan prinsip kedua dalam politik Islam. Keadilan dalam Islam tidak ada persamaannya dengan keadilan dalam sistem mana pun. Seperti halnya musyawarah, perkataan keadilan juga bersumber dari Al-Qur'an. Keadilan menurut Al-Qur'an sendiri meliputi lima hal.

1. Keadilan Allah Swt bersifat mutlak sebagaimana firman Allah Swt dalam Surah Al-Imran ayat 18.

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا
بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Artinya: Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan dia (yang berhak disembah), yang menegakkan keadilan. para malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). tak ada Tuhan melainkan dia (yang berhak disembah), yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.⁴⁶

2. Keadilan firman-Nya atas ayat-ayat-Nya tertuang dalam Al-Qur'an. Sebagaimana terlihat dalam Surah Al-Maidah ayat 25.

⁴⁵ Chalil, Moenawar, *Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad, Jilid I*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.98

⁴⁶ *Ibid*,h.564

قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي^{٤٧} فَافْرِقْ بَيْنَنَا
وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿١٦١﴾

Artinya: Berkata Musa: “Ya Tuhanku, Aku tidak menguasai kecuali diriku sendiri dan saudaraku” sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu.⁴⁷

3. Keadilan syariat-Nya yang dijelaskan oleh Rasulullah Saw.

Sebagaimana firman Allah Swt dalam Surah Al-An‘am ayat 161.

قُلْ إِنِّي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ
حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٦١﴾

Artinya: Telah ditunjuki oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus, (yaitu) agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus, dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang musyrik.⁴⁸

4. Keadilan pada alam ciptaan-Nya. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur‘an Surah At-Tin ayat 4.

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤﴾

Artinya: Sesungguhnya kami Telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.⁴⁹

5. Keadilan yang ditetapkan untuk manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Di dalam Al-Qur‘an diserukan agar supaya orang-orang yang beriman dapat menegakkan keadilan semata

⁴⁷ Ibid, h. 245

⁴⁸ Ibid, h. 587

⁴⁹ Ibid, h. 785

-mata karena Allah dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi. Bahkan Nabi Muhammad Saw sendiri dengan tegas diperintahkan agar berlaku adil terhadap orang-orang yang Non Islam sekalipun. Seperti dalam firman Allah Swt dalam Surah Asy-Syura ayat 15.

فَلِذَلِكَ فَادْعُ^ط وَاسْتَقِمْ^ط كَمَا أُمِرْتَ^ط وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ^ط
وَقُلْ^ط ءَامَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ^ط مِنْ كِتَابٍ^ط وَأُمِرْتُ^ط لِأَعْدِلَ^ط بَيْنَكُمْ^ط
اللَّهُ رَبُّنَا^ط وَرَبُّكُمْ^ط لَنَا^ط أَعْمَلْنَا^ط وَلَكُمْ^ط أَعْمَلَكُمْ^ط لَا حُجَّةَ^ط بَيْنَنَا^ط
وَبَيْنَكُمْ^ط اللَّهُ يَجْمَعُ^ط بَيْنَنَا^ط وَإِلَيْهِ^ط الْمَصِيرُ^ط

Artinya: Maka Karena itu Serulah (mereka kepada agama ini) dan tetaplah sebagai mana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan Katakanlah: “Aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil diantara kamu. Allah-lah Tuhan kami dan Tuhan kamu. bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu. tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu, Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nyalah kembali (kita).⁵⁰

C. Al-Hurriyah (Kemerdekaan / Kebebasan yang Bertanggung

Jawab)

Kebebasan yang bertanggung jawab pada prinsipnya adalah kebebasan hati nurani. Kebebasan dan kebahagiaan hati nurani tidak dapat dicapai dengan membebaskan hati dari kenikmatan hidup di dunia, mengabaikan kehidupan dunia, dan hanya selalu menghadap ke arah Tuhan di langit. Seseorang tidak lebih utama

⁵⁰ Ibid, h.985

dari pada lainnya, kecuali dengan amal dan taqwanya. Islam menekankan hal ini dengan sungguh-sungguh, karena para nabi merupakan orang-orang yang mungkin menjadi sasaran penyembahan dan perhormatan yang melebihi batas, maka Islam membebaskan hati nurani ini dengan pembebasan yang sempurna.⁵¹

D. *Al-Musaawah* (Persamaan).

Prinsip persamaan dalam politik Islam mengandung aspek yang luas. Ia mencakup persamaan dalam segala bidang kehidupan. Persamaan itu meliputi bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Persamaan dalam bidang hukum misalnya memberikan jaminan akan perlakuan dan perlindungan hukum yang sama terhadap semua orang tanpa memandang kedudukannya, apakah ia dari kalangan rakyat biasa atau dari kelompok *elite*. Prinsip ini telah ditegakkan oleh Nabi Muhammad Saw sebagai kepala negara Madinah, ketika ada sementara pihak yang menginginkan dispensasi karena tersangka dari kelompok *elite*. Nabi berkata: “Demi Allah, seandainya Fatimah putriku mencuri tetap akan kupotong tangannya”.

Prinsip persamaan dalam Islam juga sebenarnya berdasarkan kemanusiaan yang menghapus pandangan rasialisme. Pandangan ini berlaku antara laki-laki dan perempuan. Islam telah

⁵¹ *Ibid*,h.325

mengatur bagaimana terwujudnya hubungan harmonis antara suami dan istri. Begitu juga laki-laki dan perempuan menduduki tempat yang sama dilihat dari segi jenisnya. Perbedaan keduanya hanya terletak di dalam kesiapan masing-masing.⁵²

Bahkan pada masa Nabi Muhammad Saw banyak perempuan berkiprah dan beraktivitas tanpa batas di sektor publik, seperti Khadijah bint Khuwailid (istri Nabi) dan Qailah Umm Bani Ahmar. Keduanya dikenal sebagai perempuan pengusaha yang sukses. Umm Salim bint Malhan bekerja sebagai penata rias. Zainab bint Jahsyi (istri Nabi) bekerja sebagai penyamak kulit dan hasilnya disedekahkan kepada fakir miskin. Asy-Syifa` adalah perempuan pertama disertai tugas oleh Khalifah Umar ibn Al-Khattab sebagai manajer yang mengelola pasar Madinah. Bahkan, ada seorang perempuan bernama Raitah (istri sahabat Nabi) bekerja demi menghidupi suami dan anaknya. Perempuan-perempuan lainnya seperti Umm Salamah (istri Nabi), Safiyyah, Laila Al-Gaffariyah, dan Umm Sinam tercatat sebagai aktivis dan relawan kemanusiaan di medan perang menolong prajurit yang cedera dalam peperangan.

Sistem politik Islam memang sebagian besarnya merupakan ijtihad, Al-Qur'an tidak menjabarkan secara detail tentang bentuk pemerintahan, mekanisme dan pelaksanaan di lapangan. Tetapi

⁵² *Ibid*,h.369

cukup banyak prinsip-prinsip pemerintahan yang perlu menjadi pedoman dalam berpolitik. Dan ini sudah cukup untuk mewarnai sistem politik Islam dan membedakannya dengan sistem politik sekular atau sistem pemerintahan yang despotik, teokratik dan sebagainya. Selain daripada prinsip dan garis panduan yang diberikan dalam Al- Qur'an dan As-Sunnah, Islam memberi kelonggaran untuk memikirkan sendiri kaedah dan bentuk pemerintahan yang diinginkan sesuai tuntutan zaman. Kelonggaran ini benar-benar mencerminkan dinamika Syari'ah dan rasionalitas Islam. Ia juga sesuai dengan objektif syari'ah untuk menjaga kemaslahatan dan kepentingan manusia.⁵³

B. Zakat

1. Pengertian Zakat

Kata zakat merupakan bentuk mashdar yang berasal dari kata *zaka- yazki-zakatan*, yang berarti tumbuh, subur, suci, baik, dan keberkahan. Dalam Al-Qur'an, kata zakat dan derivasinya disebut 32 kali dengan makna kesucian dan kesolehan, sedekah, dan ukuran dari harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang tertentu dengan beberapa syarat. Zakat adalah ibadah wajib bagi seorang muslim yang telah memiliki syarat tertentu, berupa milik penuh, harta berkembang atau produktif, cukup senisab, bebas dari hutang, sudah sampai setahun (*haul*), melebihi darikebutuhan primer (*al-hajah al-ashliyah*).

⁵³ *Ibid*,h.58

Secara istilah, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat, karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.⁵⁴ Lebih jelasnya adalah, zakat merupakan nama bagi suatu pengambilan tertentu dari harta tertentu, menurut sifat-sifat tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu.

Muhammad Daud Ali memberikan definisi bahwa zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu, dengan syarat-syarat tertentu pula. Sedangkan menurut Garaudy, zakat bukan merupakan suatu karitas, bukan suatu kebaikan hati para pihak orang yang memberikannya, tapi suatu bentuk keadilan internal yang terlembaga, sesuatu yang diwajibkan, sehingga dengan rasa solidaritas yang bersumber dari keimanan orang dapat menaklukkan egoisme dan kerakusan dirinya.⁵⁵

2. Dasar Hukum Zakat

Hukum zakat adalah wajib aini' dalam arti kewajiban yang ditetapkan untuk diri pribadi dan tidak mungkin dibebankan kepada orang lain. Walaupun dalam pelaksanaannya dapat diwakili kepada

⁵⁴ Qardhawi, *Fiqh Zakat*, alih bahasa menjadi, *Hukum Zakat*, (Bogor; Pustaka Lentera Antar Nusa, 2007), Cet. Ke-10, h. 34-35

⁵⁵ M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta : UI Press, 1988), h.39

orang lain. Pijakan hukum disyariatkan zakat ditemukan dalam beberapa ayat al-Qur'an dan Hadist.⁵⁶ Berikut ini sebagian dari dasar hukum zakat yang termuat didalam al-Qur'an dan Hadist.

a. Al-Qur'an

Ada beberapa dasar hukum disyariatkannya zakat yang termuat dalam Al- Qur'an yaitu di antaranya:

الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿٧﴾

Artinya: "Dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukan-Nya, (yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat". (Q.S Fussilat: 7)⁵⁷

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". (Q.S At-Taubah: 60)⁵⁸

b. Hadist

Selain dari Al-Qur'an, dasar hukum wajibnya zakat dijelaskan dalam beberapa hadist nabi SAW diantaranya:

⁵⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2013), h. 38

⁵⁷ Kementrian Agama RI, *Membangun Peradaban Zakat Nasional*, (Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2015), h.477

⁵⁸ *Ibid*, h. 187

Hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Abbas

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Ibnu Abbas r. bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam mengutus Mu'adz ke negeri Yaman ia meneruskan hadits itu dan di dalamnya (beliau bersabda): "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka.”⁵⁹

Hadist itu dalil bahwa kepala Negara mempunyai kekuasaan atas wewenang untuk memungut zakat dari mereka untuk membaginnya, baik beliau lakukan sendiri atau oleh wakilnya. Kalimat: “*Tu'khadzu* (diambil) mengandung pengertian bahwa barang siapa yang menolak membayar zakat itu, maka dapat diambil secara paksa dari mereka . rasulallah SAW. Sudah menjelaskan maksud pengutusan mu'ad itu adalah untuk menjelaskan cara mencapai kebahagiaan di dunia dan ukhrawi. Sabda nya : “*Turaddu 'alla fuqorfo ihm*” (Zakat itu dikembalikan/ diberikan kepda orang-orang fakir diantara mereka) itu, cukup kepada salah satu macam saja (diantara delapan orang yang berhak mendapatkan zakat itu, tidak harus dibagi delapan).

⁵⁹ Hadits riwayat bukhori, terdapat dalam shahih bukhari, kitab zakat, bab wajib nya zakat, juz 5, nomor hadits 1395, h. 341.

Ada yang mengatakan: mungkin Nabi SAW. Mengkhususkan orang-orang fakir, karena mereka lah yang biasa diberikan dan yang banyak, akan tetapi pendapat itu tanpa dalil. Mungkin juga yang dimaksud dengan fakir disitu ialah orang yang halal mendapatkan pembagian zakat itu, maka didalamnya termasuk orang miskin. Menurut orang yang berpendapat bahwa orang miskin itu lebih membutuhkannya kesengsaraannya daripada orang fakir itu. Ada juga yang berpendapat sebaliknya.⁶⁰ bahwasanya rasulullah bersabda:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي كَنْزٍ وَجَدَهُ رَجُلٌ فِي خَرَبَةٍ: إِنَّ وَجَدْتَهُ فِي قَرْيَةٍ مَسْكُونَةٍ، فَعَرِّفْهُ، وَإِنْ وَجَدْتَهُ فِي قَرْيَةٍ غَيْرِ مَسْكُونَةٍ فَفِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ (رواه البيهقي)

Artinya: “Dari Amar Ibnu Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Tentang harta simpanan yang ditemukan seseorang di suatu tempat yang tidak berpenghuni. Jika engkau menemukannya pada kampung yang dihuni orang, maka umumkan. Jika engkau menemukannya pada kampung yang tidak dihuni orang, maka zakatnya sebagai rikaz itu seperlima.”⁶¹

⁶⁰ Abubakar Muhammad, *Terjemahan Subulus Salam II Hadits-Hadits Hukum*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1991), h. 481

⁶¹ Hadits riwayat baihaqi, terdapat dalam sunan baihaqi, *kitab zakat*, bab zakat barang tambang, juz 2, nomor hadits 7898, h.15

3. Harta Benda yang Wajib di Keluarkan

Secara garis besar zakat terbagi menjadi dua yaitu:

- a. *Zakat Nafs* (jiwa), juga disebut zakat fitrah merupakan zakat untuk mensucikan diri. Dikeluarkan dan disalurkan kepada yang berhak pada bulan Ramadhan sebelum satu Syawal (hari raya Idul Fitri). Zakat ini dapat berbentuk bahan pangan atau makanan pokok sesuai daerah yang ditempati, maupun berapapun uang yang nilainya sebanding dengan ukuran/harga bahan pangan atau makanan pokok tersebut.
- b. *Zakat mal* (harta) adalah zakat yang dikeluarkan untuk mensucikan harta, apabila harta itu telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat.⁶² Zakat *māl* terbagi menjadi beberapa klasifikasi berdasarkan jenis harta yang dimiliki. Antara lain yaitu.

1. Zakat Binatang Ternak

Hewan ternak meliputi hewan besar (unta, sapi, kerbau), hewan kecil (kambing, domba) dan unggas (ayam, itik, burung). Syarat-syarat ternak.⁶³ sebagai berikut :

- a. Sampai *nishāb*, yaitu mencapai kuantitas tertentu yang ditetapkan hukum syara'.
- b. Telah dimiliki satu tahun, menghitung masa satu tahun anak-anak ternak berdasarkan masa satu tahun induknya.

⁶² H. Gustian Djuanda, *Peleporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006), h.18

⁶³ H. Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam (Hukum Fiqih Lengkap)*, Cet-27, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994) , h.193

- c. Digembalakan, maksudnya adalah sengaja diurus sepanjang tahun dengan dimaksudkan untuk memperoleh susu, daging dan hasil perkembangbiakannya.
- d. Tidak untuk dipekerjakan demi kepentingan pemiliknya, seperti untuk membajak, mengairi tanaman, alat transportasi, dan sebagainya.

2. Zakat Emas dan Perak

Termasuk dalam kategori emas dan perak, adalah mata uang yang berlaku pada waktu itu di masing-masing Negara. Oleh karena itu segala bentuk penyimpanan uang seperti tabungan, deposito, cek, saham atau surat berharga lainnya, termasuk dalam kategori emas dan perak, sehingga penentuan *nishāb* dan besarnya zakat disertakan dengan emas dan perak.⁶⁴

Demikian juga dengan harta kekayaan lainnya, seperti rumah, villa, kendaraan, tanah, dan lain-lain yang melebihi keperluan menurut syara' atau dibeli/dibangun dengan tujuan menyimpan uang dan sewaktu-waktu dapat diuangkan. Pada emas dan perak atau lainnya yang berbentuk perhiasan, asal tidak berlebihan, maka tidak diwajibkan zakat atas barang-barang tersebut.⁶⁵

⁶⁴ *Ibid*, h. 194

⁶⁵ *Ibid*, h. 195

3. Zakat Harta Perniagaan

Harta peniagaan adalah semua yang diperuntukan untuk diperjual-belikan dalam berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan dan lain-lain. Perniagaan tersebut diusahakan secara perorangan atau perserikatan seperti CV, PT, koperasi, dan sebagainya.

4. Zakat Hasil Pertanian

Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis, seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan dan lain-lain.⁶⁶

5. Zakat *Ma'din* dan Kekayaan Laut

Ma'din (hasil tambang) adalah benda-benda yang terdapat didalam perut bumi dan memiliki nilai ekonomis, seperti emas, perak, timah, tembaga, minyak bumi, batu bara, dan lain-lain. Kekayaan laut adalah segala sesuatu yang dieksploitasi dari laut, seperti mutiara, ambar, marjan, dan lain-lain.

6. *Rikaz*

Rikaz adalah harta terpendam dari zaman dahulu atau biasa disebut dengan harta karun. Termasuk didalamnya harta

⁶⁶ *Ibid*, h. 196

yang ditemukan dan tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya.⁶⁷

4. Hikmat dan Manfaat Zakat

Hikmah Zakat Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung beberapa hikmah yang sangat besar dan mulia, baik hikmah itu berkaitan dengan orang yang berzakat, orang-orang yang menerima zakat, harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat secara keseluruhan.

Adapun hikmah yang terkandung dalam melaksanakan zakat antara lain sebagai berikut :

- a. Sebagai bentuk keimanan kepada Allah SWT mensyukuri nikmatnya, menumbuhkan ahlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghiHlangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Ibrahim ayat 7 :

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ^ط وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾

Artinya: *Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya adzab-Ku sangat pedih".*

⁶⁷ Ibid, h. 197

- b. Zakat merupakan hak bagi mustahik, maka zakat berfungsi sebagai penolong , membantu, dan membina mereka, terutama bagi fakir dan miskin akan membawa ke arah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada` Allah SWT sehingga terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta yang cukup banyak.
- c. Sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, yang karena kesibukanya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya.
- d. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana dan prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti, sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi, dan sekaligus sarana pengembangan kualitas sumberdaya manusia.
- e. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor saja, akan tetapi zakat adalah mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar.

- f. Zakat sebagai pembangunan kesejahteraan umat, karena zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi dan sekaligus pemerataan pendapatan.
- g. Dengan zakat, ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang dapat memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya. Zakat yang dikelola dengan baik, akan mampu membuka lapangan kerja dan usaha yang luas, sekaligus sebagai penguasaan aset-aset oleh umat Islam.
- h. Zakat dapat mendekatkan hubungan kasih sayang dan cinta-mencintai antara si miskin dan si kaya, rapatnya hubungan tersebut akan membuahkan beberapa kebaikan dan kemajuan serta berfaedah bagi kedua golongan dan masyarakat umum.⁶⁸

C. Tinjauan Pustaka

Mengingat kurangnya pemahaman masyarakat tentang pengelolaan zakat sesuai dengan politik hukum Islam dan Undang-Undang. Dalam hal ini diharapkan dengan adanya pengelolaan zakat dapat diwujudkan sebagai lembaga jaminan sosial untuk kesejahteraan umat, dan mengingat pentingnya tentang tata cara pengelolaan zakat sesuai dengan politik hukum Islam dan Undang-Undang, menjadi bahasan yang menarik untuk diteliti khususnya masalah pengelolaan zakat sesuai dengan politik hukum Islam dan Undang-Undang. Namun penelitian yang membahas tentang

⁶⁸ Didin Hafhiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*.....h.7

pengelolaan zakat berdasarkan politik hukum Islam dalam Undang-Undang Nomor 23 Tentang Pengelolaan Zakat belum ada yang membahasnya. Hal tersebut dikarenakan beberapa penelitian tentang zakat lebih berbicara kearah hukum positif dan fokus ke hukum Islam nya saja. Yang diantaranya sebagai berikut:

Karya yang membahas tentang pendistribusian zakat adalah skripsi karya M. Faisal Ansori yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Zakat Fitrah Secara Merata”.⁶⁹

Selanjutnya skripsi karya Iman Setya Budi dengan judul “Tata Kelola Zakat Dalam Persepektif Hukum Islam Dan Hukum Positif” dalam skripsi ini lebih menjelaskan tata kelola zakat dengan konsep pengembangan ekonomi.⁷⁰

Dan yang terakhir adalah skripsi karya Sultan Syahrir dengan judul “Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat Di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidereng Rappang” dalam skripsi ini menggambarkan pelaksanaan kewajiban zakat di maritengngae kabupaten sidereng rappang.⁷¹

⁶⁹ M. Faisal Ansori, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Zakat Fitrah Secara Merata” (Skripsi Fakultas Syari’ah Insitut Agama Islam Negeri Surakarta 2017)

⁷⁰ Iman Setya Budi, “Tata Kelola Zakat Dalam Persepektif Hukum Islam Dan Hukum Positif” (Skripsi Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2011)

⁷¹ Sultan Syahrir, “Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat Di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidereng Rappang” (Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2017)

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. Daud.1988. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Waka*. Jakarta: UI Press
- Amirsyah.2012. *Meluruskan Salah Paham Terhadap Deradikalisasi Pemikiran, Konsep dan Strategi Pelaksanaan*. Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu
- Ash-Shiddiqie, Hasbi.1958. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang
- Departemen Agama RI.1989. *Al-Qur'an dan terjemahan*. Semarang: CV.Toha putra
- Departemen Pendidikan Nasional.2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Djuanda, H.Gustian.2006. *Peleporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Fakhruddin.2008. *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN-Malang Press
- Hadi, Muhammad.2010. *Problematika Zakat Profesi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hadits riwayat baihaqi. terdapat dalam sunan baihaqi. *kitab zakat*. bab zakat barang tambang, juz 2, nomor hadits 7898
- Hadits riwayat bukhori. terdapat dalam shahih bukhari. *kitab zakat*. bab wajib nya zakat, juz 5, nomor hadits 1395
- Hafidhuddin, Didin.2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press
- Halim, M. Nipan Abdul.2001. *Mengapa Zakat Disyari'atkan*. Bandung: M2S
- Hasan, M. Ali.2008. *Zakat dan Infak*. Jakarta: Kencana
- Hasan, Muhammad.2011. *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*. Yogyakarta: Idea Press
- Hendrojono.2005. *Kriminologi Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*. Surabaya: PT. Dieta Persada
- J.L, Esposito.1996. *Ancaman Islam Mitos atau Realitas*. Edisi Revisi. Bandung: Mizan

- J. Suyuthi, Pulung.1993. *Fiqh Siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Kementrian Agama RI.2015. *Membangun Peradaban Zakat Nasional*. Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat
- Kementerian Agama RI.2013. *Modul Penyuluhan Zakat*. Jakarta: Direktur Pemberdayaan Zakat
- Kurniawan, Puji.2013. *Legislasi Undang-Undang Zakat, Jurnal Al-Risalah*, volume 13 Iman Setya Budi, “Tata Kelola Zakat Dalam Persepektif Hukum islam Dan Hukum Positif” (Skripsi Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2011)
- Marbun, B.N.2003. *Kamus Politik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- MD, Moh.Mahfud.2009. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers
- M. Faisal Ansori, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Zakat Fitrah Secara Merata” (Skripsi Fakultas Syari’ah Insitut Agama Islam Negeri Surakarta 2017)
- Moenawar, Chalil.2001. *Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad Jilid I*. Jakarta: Gema Insani
- Mudhofir, Abdullah.2009. *Jihad Tanpa Kekerasan*. Jakarta: Inti Media
- Muhammad, Abubakar.1991. *Terjemahan Subulus Salam II Hadits-Hadits Hukum*. Surabaya: Al-Ikhlash
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditiya Bakti
- Muslich, Ahmad.2005. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ms, Kaelan.2005. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Jakarta: Paradigma
- Nasar, M. Fuad. *Integrasi Pengelolaan Zakat dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011*, <http://pusat.baznas.go.id/berita-artikel/integrasi-pengelolaan-zakat-dalam-uu-no-23-tahun-2011/>, diakses 14 Desember 2015
- Qaradawi, Yusuf.1993. *Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa
- Qaradawi, Yusuf.1995. *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*. Jakarta: Gema Insani Press

- Qaradawi, Yusuf.1996. *Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa
- Qaradawi, Yusuf.2007. *Fiqh Zakat*. Bogor: Pustaka Lentera Antar Nusa
- Qaradawi,Yusuf.2011. *Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa
- Rasjid, H.Sulaiman.1994. *Fikih Islam (Hukum Fiqih Lengkap)*. Bandung: Sinar Baru Algensindo
- Risalah Resmi. Rapat Paripurna ke 9 2011-2012, Kamis 27 Oktober 2011, <https://docplayer.info/45950933-Risalah-resmi-rapat-paripurna-opr-ri-ruang-rapat-paripurna-gedung-nusantara-ii-lt-3-jln-jend-gatot-subroto-jakarta.html>
- Said Ishak, Mohd.2003. *Hudud dalam Fiqh Islam*. Johor: Universiti Teknologi Malaysia
- Sultan Syahrir, “Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat Di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidereng Rappang” (Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2017)
- Suntana, Dr. Ija.2014. *Politik Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia
- Suryadi.1980. *Kamus Baru Bahasa Indonesia*. Surabaya: Usaha Nasional
- Susiadi.2016. Metode Peneletian. Bandar Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung
- Syarifuddin, Amir.2013. *Garis-garis Besar Fiqh*. Bogor: Kencana Wardi
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
- Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Penghasilan Wajib Pajak
- Wibisono,Yusuf.2015. *Mengelola Zakat Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Yekti, Teguh Nirmala. *Menelusuri Tiga Tahun Perjalanan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011*, <http://www.gresnews.com/berita/opini/502111-menelusuri-tiga-tahun-perjalanan-uu-pengelolaan-zakat/0/> diakses 14 Desember 2015
- Zuhdi, Masyfuk.1994. *Masa 'il Fiqhiyah*. Jakarta: CV Masagung
- Zuhri, Saifudin.2010. *Zakat di Era Reformasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada